

RENCANA KERJA TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN BARRU

Jalan H. A. Iskandar Unru Nomor 2 Kabupaten Barru 90712



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
36. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8).
45. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Perangkat Daerah adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu;

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1). Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (2). Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah dan menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perikanan;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Tenaga Kerja;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- aa. Kecamatan Barru;
- bb. Kecamatan Tanete Rilau;
- cc. Kecamatan Tanete Riaja; dd. Kecamatan Pujananting; ee. Kecamatan Balusu;
- dd. Kecamatan Soppeng Riaja;
- ee. Kecamatan Mallusetasi.

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

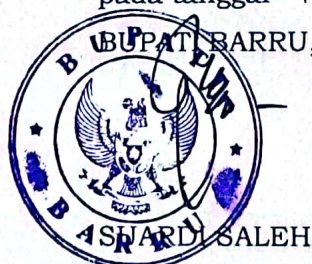
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 4 Agustus 2023



Diundangkan di Barru

pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 473/BAPPELITBANGDA/XII/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Ketua

1. Membimbing Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
3. Melaporkan hasil kerja tim baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.

B. Sekretaris

1. Menghimpun dan menginventaris penyelenggaraan administrasi penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
3. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Kelompok Kerja

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan Rencana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

3. Melaksanakan tugas administrasi lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 5 Desember 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
4. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR :473/BAPPELITBANGDA/XII/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Subbidang Keuangan
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Muhammad Anwar, SE (Bendahara Pengeluaran)
4. Hj. Syamsiah, S.Sos (Pengelola Gaji)
5. Musmuallim (Pranata Barang dan Jasa)

B. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program
2. Nimah Z. Hamid, S.Sos (Pengelola Program dan Kegiatan)
3. Fitri Sandi, S.Kom (Ahli Pertama Pranata Komputer)
4. Burhan (Teknisi Peralatan Kantor)
5. Anwar (Pengadministrasi Kepegawaian)



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-37
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-60
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-7
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB. V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-2
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-32
II.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-38
II.4	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-39
II.5	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-41
II.6	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	II-44
II.7	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	II-45
II.8	Tabel Indikator TPB Bappelitbangda	II-46
II.9	Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS	II-47
II.10	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-51
II.11	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-60
III.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru .	III-3
III.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024	III-5
III.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru	III-8
III.4	Rumusan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru	III-13
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Barru	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
I-1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru	I-3
I-2	Alur Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah (Kedudukan Renja Perangkat Daerah dalam SPPN)	I-4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

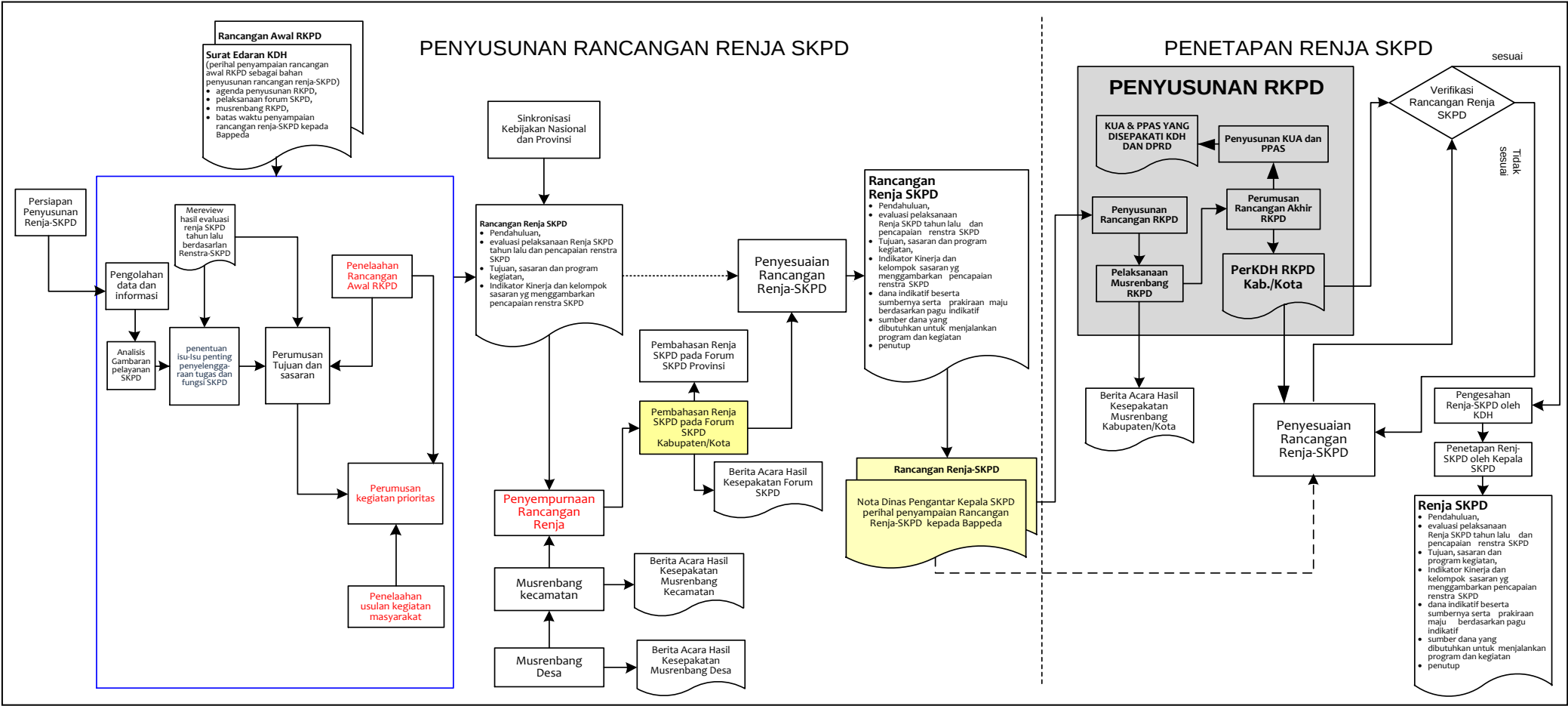
Perencanaan kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja sungguh merupakan issu yang strategik yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi.

Perencanaan kinerja menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut sebagai Rencana Kerja (Renja). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja pada Lingkup Bappelitbangda Kabupaten Barru untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 melalui 6 (enam) tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

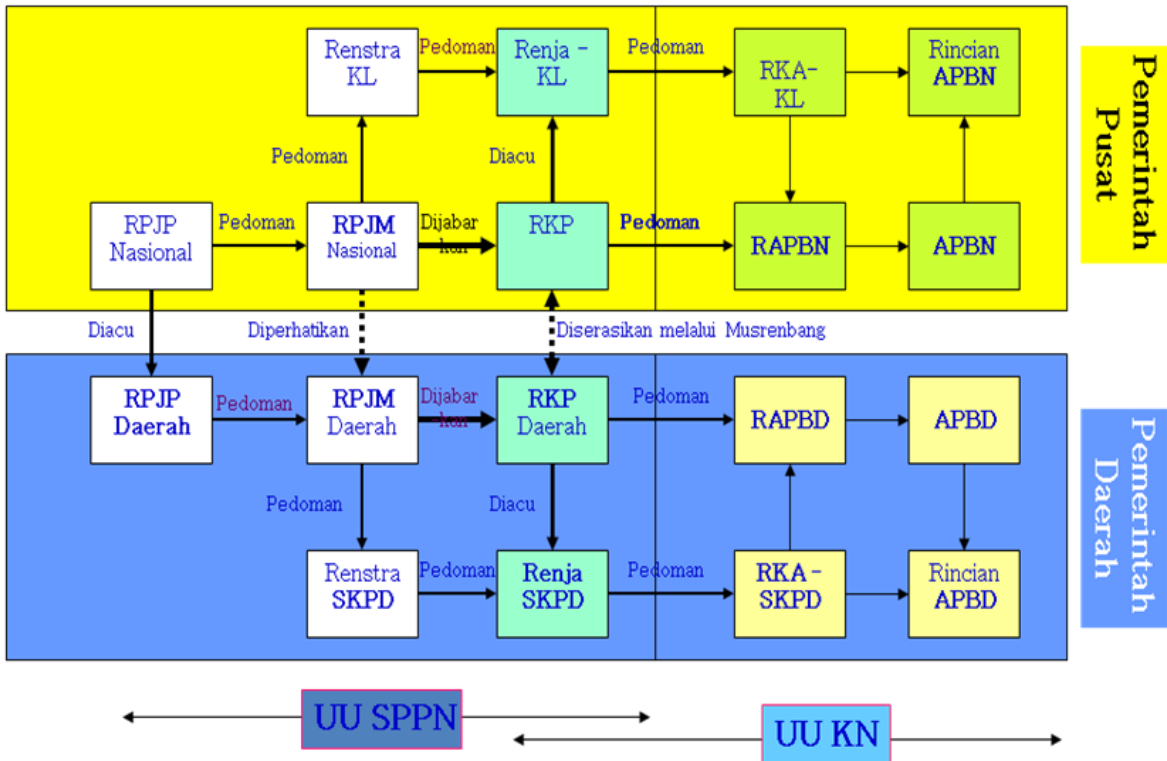
Tahapan pertama adalah persiapan penyusunan Renja yang terdiri dari penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja kepada seluruh anggota tim, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. **Tahapan kedua** adalah penyusunan Rancangan Awal Renja yang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. **Tahapan ketiga** yaitu penyusunan rancangan Renja yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja dan selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. **Tahapan keempat** adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. **Tahapan kelima** adalah perumusan Rancangan Akhir Renja yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD. **Tahapan keenam** adalah penetapan Renja melalui Keputusan Bupati Barru paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Barru tentang RKPD Tahun 2024 ditetapkan. Tahapan penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru



Renja Bappelitbangda Tahun 2024 berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Sementara itu, RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Barru yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Renja Bappelitbangda Tahun 2024 menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun RKA Bappelitbangda Tahun 2024. Keterkaitan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.2
Alur Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah
(Kedudukan Renja Perangkat Daerah dalam SPPN)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 33);
29. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah untuk memberi gambaran akan bentuk kerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tujuannya adalah:

1. Menghubungkan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional yang lebih rinci.
2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran.
3. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja.
4. memudahkan manajemen dalam menetapkan target pada unit kerja.
5. Memudahkan dalam membuat spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan capaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru serta susunan garis besar isi dokumen, adalah:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri dari:

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, terdiri dari:

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Mengingat laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Bappelitbangda belum disusun pada Tahun 2022, maka dibuat rekapitulasi hanya berdasarkan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Bappelitbangda. Rekapitulasi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3 Poin	-	Level 3	Level 2	66,67%	3 Poin	3 Poin	66,67%
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		20 JPL	20 JPL	100,00 %	20 JPL	20 JPL	100,00%
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						ditetapkan tepat waktu								
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	-	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	100,00 %	27 Orang/bulan	54 Orang/bulan	38,57%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	-	8 Orang	8 Orang	100,00 %	8 Orang	8 Orang	12,12%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	-	100%	60%	60,00%	100%	100%	41,43%
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	-	1 Paket	0 Paket	0,00%	0	0	0,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan								
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	2 Paket	40,00%
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	-	1 Paket	0 Paket	0,00%	1 Paket	1 Paket	20,00%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	-	4 Paket	1 Paket	25,00%	1 Paket	2 Paket	10,00%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	-	1 Paket	0 Paket	0,00%	1 Paket	1 Paket	20,00%
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	-	12 Laporan	3 Laporan	25,00%	0 Laporan	0 Laporan	5,00%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	630 Laporan	-	98 Laporan	85 Laporan	86,73%	92 Laporan	177 Laporan	28,10%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	66,67%	66,67%	0%	66,67%	66,67%
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	-	3 Unit	2 Unit	66,67%	0 Unit	2 Unit	10,53%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	-	24 Laporan	24 Laporan	100,00 %	24 Laporan	48 Laporan	37,21%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	-	100%	50%	100,00 %	100%	75%	100,00%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	-	4 Unit	3 Unit	50,00%	0 Unit	3 Unit	75,00%
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	-	8 Unit	0 unit	0,00%	0 Unit	0 Unit	0,00%
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit	-	51 Unit	9 Unit	17,65%	24 Unit	33 Unit	12,09%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /	Jumlah Gedung	5 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00%	1 Unit	1 Unit	20,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		-						
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersedian perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
						Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00 %	2 Berita Acara	3 Berita Acara	42,86%
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00 %	1 Berita Acara	2 Berita Acara	33,33%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00 %	1 Berita Acara	2 Berita Acara	28,57%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	44 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00 %	8 Dokumen	15 Dokumen	34,09%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah	Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan								
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	155 Masukan	-	31 Masukan	31 Masukan	100,00 %	0 Masukan	31 Masukan	20,00%
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	176 Orang	-	0 Orang	0 Orang	100,00 %	44 Orang	44 Orang	25,00%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan								
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	33 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00 %	8 Laporan	13 Laporan	39,39%
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	80 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100,00 %	16 Laporan	32 Laporan	40,00%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan								
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	256 Rekomendasi / Kajian / Laporan	-	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	100,00 %	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	96 Rekomendasi / Kajian / Laporan	37,50%
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	132 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	100,00 %	24 Dokumen	48 Dokumen	36,36%
5	01	03	2.01	04	Koordinasi	Jumlah Laporan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	24 Laporan	40,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		-			%			
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00 %	8 Dokumen	16 Dokumen	36,36%
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	20 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00 %	4 Laporan	8 Laporan	40,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pembangunan Manusia	Manusia								
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	96 Rekomenda si / Kajian / Laporan	-	18 Rekomenda si / Kajian / Laporan	18 Rekomenda si / Kajian / Laporan	100,00 %	18 Rekomenda si / Kajian / Laporan	36 Rekomenda si / Kajian / Laporan	37,50%
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00 %	8 Dokumen	16 Dokumen	36,36%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	20 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00 %	4 Laporan	8 Laporan	40,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian								
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %	4 Dokumen	8 Dokumen	36,36%
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %	2 Laporan	4 Laporan	40,00%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi	176 Rekomenda si / Kajian / Laporan	-	33 Rekomenda si / Kajian / Laporan	33 Rekomenda si / Kajian / Laporan	100,00 %	33 Rekomenda si / Kajian / Laporan	66 Rekomenda si / Kajian / Laporan	37,50%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun								
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00 %	8 Dokumen	16 Dokumen	36,36%
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100,00 %	4 Laporan	8 Laporan	40,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	77 Dokumen	-	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00 %	14 Dokumen	28 Dokumen	36,36%
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	35 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	100,00 %	7 Laporan	14 Laporan	40,00%
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 1000 Poin	-	≥ 685 Poin	≥ 685 Poin	100,00 %	≥ 764 Poin	≥ 764 Poin	60,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	41,43%
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	2 Laporan	41,43%
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	2 Laporan	41,43%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi								
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,00 %	0 Rekomendasi	1 Rekomend asi	20,00%
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	0 Laporan	1 Rekomend asi	20,00%
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	-	100%	100%	100,00 %	100%	100%	41,43%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	2 Laporan	41,43%

Adapun pencapaian kinerja pada tahun lalu yaitu tahun 2022 secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.1.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 98 Laporan. Adapun realisasinya adalah 85 laporan dengan capaian sebesar 86,73%.

1.1.2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1.2.1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 51 Unit. Adapun realisasinya adalah 9 Unit dengan capaian sebesar 17,65%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 28 Orang/bulan. Adapun realisasinya adalah 28 Orang/bulan dengan capaian sebesar 100%.

2.1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.1.2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 8 orang. Adapun realisasinya adalah 8 orang dengan capaian sebesar 100%.

2.1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket. Adapun realisasinya adalah 1 Paket dengan capaian sebesar 100%.

2.1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 24 laporan. Adapun realisasinya adalah 24 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasinya adalah 12 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

2.2.1.1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota sebanyak 2 Berita Acara. Adapun realisasinya adalah 2 Berita Acara dengan capaian sebesar 100%.

2.2.1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sebanyak 7 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 7 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) sebanyak 31 masukan. Adapun realisasinya adalah 31 masukan dengan capaian sebesar 100%.

2.2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 5 Laporan. Adapun realisasinya adalah 5 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sebanyak 16 Laporan. Adapun realisasinya adalah 16 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

2.3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 24 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 24 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil

Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan sebanyak 12 Laporan. Adapun realisasinya adalah 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

2.3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada

Bidang Perekonomian sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 4 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA sebanyak 2 Laporan. Adapun realisasinya adalah 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2.3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang

Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 14 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 14 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

- 2.3.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan sebanyak 7 Laporan. Adapun realisasinya adalah 7 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- 2.4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- 2.4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

- 2.4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

- 2.4.1.3. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi. Adapun realisasinya adalah 1 rekomendasi dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.4. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2.4.2.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah:

1. Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah dalam bentuk perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang dipengaruhi oleh undangan pihak terkait yang berasal dari kementerian, pemerintah provinsi atau daerah lainnya.
2. Kegiatan Pemeliharaan merupakan kegiatan yang hanya digunakan apabila terdapat barang milik daerah yang memerlukan tindakan untuk menjaga atau memperbaiki

kendaraan operasional, mebel, gedung, peralatan dan mesin kantor lainnya sehingga kondisinya tetap layak dipakai.

4.2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor penyebab terpenuhinya pemenuhan target kinerja adalah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan berbasis pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
3. Komitmen pengguna anggaran dalam menjaga konsistensi program yang ada pada RKPD sepenuhnya berpedoman kepada RPJMD, dan program yang ada pada APBD sepenuhnya berpedoman kepada RKPD
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengawal kegiatan agar tetap on the track dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan
5. Optimalnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan
6. Optimalnya peran APIP dalam melakukan pengawasan penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui reviu dokumen perencanaan dan penganggaran

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan indikator Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2022 realisasi adalah LEVEL 2 tidak sesuai dengan target Renstra tahun berjalan yaitu LEVEL 3. Meskipun berdasarkan perbandingan ini realisasi tidak sesuai dengan target, proyeksi target yang akan digunakan pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya tetap menggunakan proyeksi sesuai arah Renstra untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah yaitu LEVEL 3.
- b) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH dengan indikator Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu pada tahun 2022 realisasi sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.
- c) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan indikator Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan pada tahun 2022 realisasi sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka

menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

- d) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan indikator Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 realisasi sebesar ≥ 685 Poin telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a) Membuat rencana operasional tahunan meliputi perumusan: (1) input atau sumberdaya yang akan dibutuhkan; (2) aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan; (3) volume output yang akan dihasilkan, serta (4) hasil (outcomes) sebagai indikator keberhasilan program/kegiatan. Akurasi perencanaan kinerja sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran karena perencanaan yang baik kemungkinan besar akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan.
- b) Melakukan administrasi kinerja dengan baik yang akan diperlukan dalam pelaporan kinerja. Selain itu, setiap tantangan dan hambatan perlu didokumentasikan dengan tertib guna pembelajaran organisasi ke depan. Disamping itu, dokumen-dokumen kinerja dimaksud juga merupakan informasi yang penting dalam pengukuran kinerja organisasi.
- c) Melakukan pengukuran kinerja. untuk menilai apakah sumberdaya input yang disediakan telah terpakai secara efektif dan efisien dalam

mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah semua elemen organisasi (input, proses, output) telah berfungsi secara optimal untuk menghasilkan outcomes. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah target kinerja indikator kinerja utama telah tercapai sesuai dengan rencana kerja tahunan.

- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Monitoring program/kegiatan dilakukan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan anggaran sebagai upaya tindakan preventif dalam mencegah kegagalan dan menilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Sedangkan evaluasi program/kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana program/kegiatan pemerintah telah berhasil mencapai tujuannya dan apakah hasil dimaksud telah memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi tujuan organisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Menganalisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru digunakan Indikator Kinerja berdasarkan target Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026. Penilaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dilakukan terhadap indikator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya berdasarkan kondisi target menurut Renstra Bappelitbangda dan perkiraan tahun berjalan, menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Bappelitbangda.

Mengingat pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

Rekapitulasi hasil pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn n+1)	2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perencanaan Pembangunan											
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn n+1)	2022 (thn n-2)	2023 (thn n-1)	2024 (thn n)	2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4	Penelitian dan Pengembangan											
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan kelitbangan daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap bidang urusan perencanaan dan bidang urusan kelitbangan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKK). Kinerja Pelayanan Bappelitbangda terdiri dari 10 IKK yang terdiri dari enam indikator bidang urusan Perencanaan Pembangunan dan empat indikator bidang urusan Penelitian dan Pengembangan. Realisasi indikator sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra 2021-2026 telah memenuhi target. Rinciannya adalah pada IKK terdapat sembilan indikator yang melebihi atau diatas target kinerja yang direncanakan, satu indikator yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan dan tidak terdapat indikator yang tidak memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan. Analisis kinerja keenam indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Target indikator kinerja pada tahun 2022 adalah tujuh dokumen dan realisasi sebesar tujuh dokumen dengan capaian sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2022 adalah:
 - 1) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023;
 - 2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023;
 - 3) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023;
 - 4) Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 34 Tanggal 1 Juli 2022 Berita Daerah Nomor 35;

- 5) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022;
- 6) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022; dan
- 7) Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022 Tanggal 5 Agustus 2022 Berita Daerah Nomor 41.

Selain dokumen rencana pembangunan tahunan, Kabupaten Barru juga telah menetapkan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Dokumen perencanaan dimaksud adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4); dan
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1).

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 100% dicapai secara berturut-turut selama lima tahun yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dengan RPJMD yaitu Program yang ada pada RPJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD.

3. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai secara berturut-turut selama lima tahun yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD yaitu program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

4. Persentase implementasi rencana kelitbangan. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Target Indikator Kinerja “Persentase implementasi rencana kelitbangan” terealisasi 100% dipengaruhi oleh terdapat tujuh jumlah kelitbangan dalam dokumen RKPD sesuai dengan perencanaan kelitbangan dalam dokumen RPJMD.

5. Target Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” memiliki realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini

dipengaruhi oleh telah diintegrasikannya seluruh dokumen kelitbang ke dalam perencanaan daerah

6. Target Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah” sesuai dengan target dipengaruhi oleh telah dilakukannya kegiatan sosialisasi, diseminasi dan coaching clinic bagi pelaku inovasi di perangkat daerah. Hal ini meningkatkan pemahaman sumber daya manusia pada perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

7. Target Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” sesuai dengan target disebabkan adanya kebijakan daerah bagi seluruh perangkat daerah untuk membuat inovasi yang dapat menunjang kinerja pegawai dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan daerah dimaksud berupa percepatan pelaksanaan inovasi daerah yang merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Selain itu, Kabupaten Barru pada tahun 2022 mengikuti arahan pemerintah pusat pada dua kementerian/lembaga masing-masing:

- 1) Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti Inovasi Government Award (IGA) **Kategori Kabupaten** dengan nilai 46,13 berada pada peringkat 318 dan masuk pada predikat INOVATIF
- 2) Kementerian Riset dan Teknologi untuk menghitung nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai indeks 2,91 masuk pada kategori SEDANG

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan unsur penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, optimalisasi sumber daya manusia yang

ada perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan yang bersinergi dari Nasional, Provinsi dan Daerah. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai. Adapun Identifikasi masalah berdasarkan sebagai berikut:

Tabel. II.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappelitbangda Kabupaten Barru

Urusan	Permasalahan	Penanggung Jawab
Perencanaan	Belum Optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru
	Koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal	
	Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergi, masive dan sistematis	
	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	
	Koordinasi dalam upaya penataan peraturan masing kurang sinergi dengan OPD utama	
Penelitian dan Pengembangan	Fungsi kelitbangan belum optimal	
	Kurangnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah	
	Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur	
	Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.	

Berdasarkan analisis permasalahan yang diperoleh dari perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten barru, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses

perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda Kabupaten Barru, yang antara lain:

Tabel II.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersedian data yang belum akurat	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai	Lemahnya dalam menganalisis data Perbedaan data dan Informasi
2.	Koordinasi yang belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal	Analisis Perencanaan belum optimal dalam mengarahkan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah.
3.	Monitoring dan Evaluasi belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Ketersediaan analisa dan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kinerja belum ada.
4.	Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah belum optimal.	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah.	Kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung belum memadai.
5.	Pemanfaatan Inovasi daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah belum optimal	Pendampingan dan evaluasi dari keberlanjutan Inovasi belum optimal.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Proses telaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Barru diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial.

Mandiri adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru

Berkeadilan adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Bernafaskan Keagamaan adalah Koondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Adapun misi sebagai berikut :

Misi	
Misi 1 :	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
Misi 2 :	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
Misi 3 :	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
Misi 4 :	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Misi 5 :	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
Misi 6 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Misi 7 :	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Berdasarkan misi kepala daerah, Bappelitbangda sebagai urusan penunjang menitikberatkan perannya dalam pencapaian Misi Ke-Enam yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

(good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapeeda untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel II.5
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Bappelitbangda Kabupaten Barru

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	Keterlibatan unsur perencana dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2.	Belum optimalnya sistem database dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan.	Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
		Koordinasi tim antara bidang-bidang perencana dengan OPD koordinasinya.
3.	Dinamika Perundang-undangan.	Rapat koordinasi teknis pembangunan daerah tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

2.3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan pembangunan daerah mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi daerah yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dukungan tentang apa yang harus diperankan pusat dan provinsi untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang dikoordinir oleh Bappelitbangda dengan Bappenas dan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di

pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat komunikasi tersebut. Kebijakan koordinasi dalam pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah melalui:

1. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang berfungsi mengintegrasikan platform perencanaan dan penganggaran untuk mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional
2. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SGDs).
3. Satu Data Indonesia
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional
6. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)

Penelaahan dokumen Renstra Kementerian dan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan dokumen antara tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Telaah dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung dengan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru.

2.3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (dua) sasaran strategis

dalam Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kenijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salahsatu sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 **yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.**
- Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

2.3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dan;

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam negeri.

Tabel II.6
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Berdasarkan Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Renstra Bappenas			
a.	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencanan kerja K/L dan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal	Perbedaan Periode waktu Perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di Kementrian memudahkan koordinasi.
2.	Renstra Kemendagri			
	% Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayan publik	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi belum dioptimalkan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten	Belum Optimalnya Koordinasi untuk memaksimalkan hasil-hasil penelitian dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan	Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penerapan penelitian dan inovasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah

2.3.3.3. Review Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melaksanakan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 telah menetapkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;

- 3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
- 4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
- 5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.
- 6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel II.7
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan			
a.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Program tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data mikro penunjang perencanaan berbasis kawasan (Kecamatan) masih terbatas.	Terciptanya komitmen antara Prov dan Kabupaten.
b.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Masih rendahnya kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daeah	Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi bagi OPD Kabupaten Barru dalam menyusun Dokumen Perencanaan	Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengmebangan harus melalui Bapedda.

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru

Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-

2031. Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai pelaksana urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam menyesuaikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2.3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barru

Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan, pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Barru terdapat Indikator yang menjadi kewenangan Bappelitbangdaialah sebagai berikut:

Tabel II.8
Tabel Indikator TPB Bappelitbangda

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	Menurun Menjadi 7-8 %
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Meningkat
		PDB per kapita		Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada

Tabel II.9
Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Bappelitbangda pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadai acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barru
2	Keterlibatan KLHS	- Belum Optimalnya pengawalan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan - Data pendukung	Dinamika Perundang-undangan.	Regulasi tentang KLHS yang mewajibkan untuk penyusunan dokumen KLHS setiap dokumen perencanaan

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappelitbangda Kabupaten Barru senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda Kabupaten Barru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Resntra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun review singkat dari aspek-aspek dalam perumusan isu-isu strategis sebagaimana yang telah disajikan sebagai berikut:

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- a. Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra Bappelitbangda telah tercapai. Namun demikian tantanganperencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga Bappelitbangda harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tatangan tersebut.

- b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas;
 - Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana KerjaK/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan nasional.
 - Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Secara umum berdasarkan Renstra yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.

- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru; Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru; Implikasi dari KLHS adalah Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern;
2. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah; dan
5. Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappelitbangda

dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappelitbangda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024. Review meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Bappelitbangda.

Rekapitulasi hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 untuk program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.083.729.032	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.480.787.198	
			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	170.000.000			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	2.426.732.032	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	2.986.390.406	
I.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.426.732.032	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.986.390.406	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menyesuaikan dengan jumlah ASN Bappelitbangda periode bulan April 2023
I.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	170.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	87.776.000	
I.2.1	Pendidikan dan	Barru	Jumlah Pegawai	26 Orang	170.000.000	Pendidikan dan	Barru	Jumlah Pegawai	26 Orang	87.776.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	412.897.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	200.147.600	
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	5.850.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.655.000	Jumlah target pada rancangan awal berdasarkan jumlah satuan barang, sedangkan pada analisis kebutuhan berdasarkan jumlah pembelian barang
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	479 Paket	32.005.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.510.600	
I.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	99 Paket	10.005.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.079.000	
I.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Barru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	22.384.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Barru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.152.500	
I.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.732.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.437.500	
I.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.920.000	
I.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	325.121.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	169.393.000	
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 Persen	44.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	34.142.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penunjang urusan pemerintah daerah					penunjang urusan pemerintah daerah			
I.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	44.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	34.142.000	Target berdasarkan RKBMD Tahun 2024
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	147.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	127.806.192	
I.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	64.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192	
I.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.600.000	
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen	53.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	44.525.000	
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	28.850.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	15.025.000	Target berdasarkan RKBMD Tahun 2024
I.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	19.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	21.450.000	
I.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /	1 Unit	8.050.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lainnya		Direhabilitasi			Lainnya		Direhabilitasi			
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100 Persen	1.144.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	743.142.500	
			Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100 Persen	135.000.000			Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%		
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100 Persen	1.124.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	655.458.000	
II.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Barru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	20.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Barru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	11.905.000	
II.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	23.154.000	
II.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	90.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	90.343.000	
II.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12 Dokumen	989.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	530.056.000	Dokumen KLHS disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah	100 Persen	20.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah	100%	7.221.500	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan			Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan			
II.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	20.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	7.221.500	
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	135.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	80.463.000	
II.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	67.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	12.761.000	
II.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	67.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	67.702.000	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	510.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	558.071.200	
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	220.566.200	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun			Manusia		perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun			
III.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	42.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	44.168.400	
III.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	63.317.000	
III.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	42.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	25.217.900	
III.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	87.862.900	
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	168.363.600	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun					Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun			
III.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	42.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	28.831.800	
III.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	46.587.000	
III.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	42.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	57.820.800	
III.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	35.124.000	
III.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	169.141.400	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	42.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	75.239.800	
III.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	87.414.000	
III.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	42.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	2.217.000	
III.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	4.270.600	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 842 Poin	805.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 842 Poin	436.898.100	
IV.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100 Persen	644.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	318.230.800	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	161.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	77.927.000	
IV.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	161.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	73.173.800	
IV.1.3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Barru	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	161.000.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Barru	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	70.652.500	
IV.1.4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	161.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	96.477.500	
IV.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100 Persen	161.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	118.667.300	
IV.2.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	161.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	118.667.300	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan adalah Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan tahun 2023, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2024 yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam mendukung kebijakan perencanaan nasional Tahun 2024, Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan memiliki tugas pokok sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, think-tank, koordinator dan administrator di daerah. Dukungan tersebut berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 melalui pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Barru berperan menjamin sinergitas perencanaan di daerah dengan yang ada di pusat untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang ditentukan khususnya pada program prioritas sesuai urusan pemerintahan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Barru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026.

Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Barru yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Visi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah:

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

1. **Sejahtera** adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial
2. **Mandiri** adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru.
3. **Berkeadilan** adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
4. **Bernafaskan Keagamaan** adalah Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Visi di atas menjelaskan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Barru melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu misi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagitujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

- MISI 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
- MISI 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
- MISI 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal

- MISI 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
- MISI 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
- MISI 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Adapun keterkaitan antara visi dan misi kepala daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru

VISI	POKOK VISI	MISI
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
	Bernafaskan keagamaan	Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka Bappelitbangda menetapkan dua tujuan dan tiga sasaran strategis disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Bappelitbangda dalam lima tahun ke depan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil (T1)

Indikator Tujuan: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP Kabupaten Barru

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP berdasarkan

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sub komponen dokumen Perencanaan Strategis dan sub komponen dokumen Perencanaan kinerja Tahunan. Penilaian pada masing-masing sub komponen meliputi 1) pemenuhan, 2) kualitas, dan 3) implementasi.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah (S1)

Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

IPPD selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan pada tingkat kabupaten, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah.

IPPD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola perencanaan daerah dalam periode tertentu. Dimensi Indeks adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran IPPD.

IPPD ini diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi : Bauran program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program dalam RKPD baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD
- keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan anggaran untuk mencapai sasaran Kegiatan dalam RKPD dan Renja baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD
- kegiatan pada Renja Perangkat Daerah yang masuk dalam DPA Perangkat Daerah

3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP dan pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi.

Diukur dengan melihat:

- o kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP
- o kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam RKPD Provinsi
- o kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP prioritas dalam Renja K/L
- o kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam Renja Perangkat daerah Provinsi

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner (S2)

Indikator Sasaran :

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Definisi : Membandingkan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terhadap jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Definisi : Membandingkan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah terhadap jumlah inovasi yang diusulkan

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Bappelitbangda disajikan dalam table berikut.

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4	5
Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	≥ 25

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA/RUMUS		TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4		5
	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (60)	keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD	-
				keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD	
				keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD	
				keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra	
			Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (20)	kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD	
				kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA	
			Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (20)	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi	
				kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP	
				kegiatan prioritas Renja yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam Renja Perangkat daerah Provinsi	
				kegiatan prioritas Renja yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam Renja K/L	
	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	(Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah) x 100%	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA/RUMUS		TARGET TAHUN 2024
1	2	3	4		5
				berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	(Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang diusulkan) x 100%		100%
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB		≥ 60 Poin
	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB		≥ 60 Poin

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.218.898.998,-. Adapun rumusan program dan kegiatan serta dengan sasaraannya disajikan dalam table berikut.

Tabel III.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode Rekening Pemuktahiran					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
																	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.218.898.998				5.740.840.598
5	01				PERENCANAAN		5	01				PERENCANAAN							4.782.000.898				5.130.840.598
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	Level 1	Level 2		Level 3	3.480.787.198			Level 3	3.646.840.598
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL				20 JPL	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%		100%	2.986.390.406			100%	2.986.390.406
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang	27 Orang	27 Orang	Barru	27 Orang/bulan	2.986.390.406	DAU		27 Orang/bulan	2.986.390.406
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	-		100%	87.776.000			100%	190.000.000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	8 Orang	-	Barru	26 Orang	87.776.000	DAU		30 Orang	190.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	66,66%	100%		100%	200.147.600			100%	257.169.000
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	-	Barru	1 Paket	4.655.000	DAU		1 Paket	5.850.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120 Paket	-	2 Paket	Barru	2 Paket	9.510.600	DAU		2 Paket	32.005.000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	0 Paket	4 Paket	Barru	6 Paket	4.079.000	DAU		6 Paket	10.005.000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket	4 Paket	Barru	4 Paket	4.152.500	DAU		6 Paket	22.384.000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	0 Paket	4 Paket	Barru	4 Paket	6.437.500	DAU		3 Paket	6.732.000
5	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	-	Barru	12 Laporan	1.920.000	DAU		12 Laporan	10.800.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	85 Laporan	92 laporan	Barru	126 Laporan	169.393.000	DAU		126 Laporan	169.393.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	66,67%	-		100%	34.142.000			100%	44.000.000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	2 Unit	-	Barru	9 Unit	34.142.000	DAU		3 Unit	44.000.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode Rekening Pemuktahiran					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
																	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%		100%	127.806.192			100%	127.806.192
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Paket	24 Laporan	24 Laporan	Barru	24 Laporan	52.206.192	DAU		24 Laporan	52.206.192
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	75.600.000	DAU		12 Laporan	75.600.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	66,67%	100%		100%	44.525.000			100%	41.475.000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	3 Unit	3 Unit	Barru	6 Unit	15.025.000	DAU		6 Unit	15.025.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit	9 Unit	24 Unit	Barru	51 Unit	21.450.000	DAU		51 Unit	21.450.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	Barru	1 Unit	8.050.000	DAU		1 Unit	5.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%		100%	743.142.500			100%	974.000.000
						Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD							Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%	100%	100%		100%				100%	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	100%	100%		100%	655.458.000			100%	819.000.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	Barru	1 Berita Acara	11.905.000	DAU		2 Berita Acara	20.000.000
5	01	02	2.01	04	Kordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5	01	02	2.01	0004	Kordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Barru	1 Berita Acara	23.154.000	DAU		2 Berita Acara	50.000.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Barru	2 Berita Acara	90.343.000	DAU		2 Berita Acara	90.000.000
5	01	02	2.01	07	Kordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	5	01	02	2.01	0007	Kordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	44 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Barru	11 Dokumen	530.056.000	DAU		11 Dokumen	659.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100%	100%	100%		100%	7.221.500			100%	20.000.000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	176 Orang	44 Orang	44 Orang	Barru	44 Orang	7.221.500	DAU		44 Orang	20.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi	Persentase laporan	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi	Persentase laporan	100%	100%	100%		100%	80.463.000			100%	135.000.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode Rekening Pemuktahiran					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
																	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang terusun sesuai peraturan perUuan						dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang terusun sesuai peraturan perUuan										
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	33 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Barru	8 Laporan	12.761.000	DAU		10 Laporan	67.500.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	80 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Barru	16 Laporan	67.702.000	DAU		16 Laporan	67.500.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang terusun sesuai peraturan perUuan	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang terusun sesuai peraturan perUuan	100%	100%	100%		100%	558.071.200			100%	510.000.000
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terusun	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terusun	256 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan		48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	220.566.200			64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	Barru	24 Dokumen	44.168.400	DAU		36 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	63.317.000	DAU		12 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Barru	8 Dokumen	25.217.900	DAU		12 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Barru	4 Laporan	87.862.900	DAU		4 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terusun	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terusun	96 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan		18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	168.363.600			24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Barru	8 Dokumen	28.831.800	DAU		12 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Barru	4 Laporan	46.587.000	DAU		4 Laporan	42.500.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode Rekening Pemuktahiran					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
																	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Bidang Perekonomian							Bidang Perekonomian											
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Barru	4 Dokumen	57.820.800	DAU		6 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Barru	2 Laporan	35.124.000	DAU		2 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	176 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan		33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	169.141.400			44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Barru	8 Dokumen	75.239.800	DAU		12 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Barru	4 Laporan	87.414.000	DAU		4 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Barru	14 Dokumen	2.217.000	DAU		21 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Barru	7 Laporan	4.270.600	DAU		7 Laporan	42.500.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							436.898.100				610.000.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 1000 Poin	≥ 685 Poin	≥ 764 Poin		≥ 842 Poin	436.898.100			≥ 921 Poin	610.000.000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUuan	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUuan	100%	100%	100%		100%	318.230.800			100%	488.000.000
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Lapoan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	77.927.000	DAU		1 Laporan	122.000.000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	5 Lapoan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	73.173.800	DAU		1 Laporan	122.000.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode Rekening Pemuktahiran					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemuktahiran	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
																	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Daerah, Reformasi Birokrasi							Daerah, Reformasi Birokrasi										
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Barru	1 Rekomendasi	70.652.500	DAU		1 Rekomendasi	122.000.000
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5 Lapoan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	96.477.500	DAU		1 Laporan	122.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	100%	100%		100%	118.667.300			100%	122.000.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	118.667.300	DAU		1 Laporan	122.000.000

Tabel III.4
Rumusan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	
			2024	2025
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	Level 3
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya keandalan pelaporan keuangan perangkat daerah		100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya efektivitas penyusunan RKBMD perangkat daerah	Penjabaran usulan pada RKBMD dan RKBMDP perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA dan DPPA	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem informasi dan pengembangan pegawai	1) Persentase data kepegawaian yang akurat dan up to date	100%	100%
		2) Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahanan daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahanan daerah	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan	100%	100%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan tingkat Kabupaten	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya efektivitas penyusunan dokumen perencanaan	Penjabaran konsistensi target program RPJMD dengan target RKPD	100%	100%
		Penjabaran konsistensi target kegiatan RKPD dengan target APBD	100%	100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya layanan data terpadu dan berorientasi kepada pengguna	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi pemerintahan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi pemerintahan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	
			2024	2025
1	2	3	4	5
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya efektivitas proses pengendalian dan monev pelaksanaan pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dijalankan oleh perangkat daerah	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian/laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian/laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian/laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	100%	100%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Inovatif	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 842 Poin	≥ 921 Poin
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Berkembangnya kelitbangan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terfasilitasinya perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 terumus dalam empat program, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.218.898.998. Program dan kegiatan tersebut berpedoman pada RKPD Kabupaten Barru tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tugas pokok dan tupoksi Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan. Sementara itu, alokasi anggaran yang digunakan dalam rencana kerja adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Barru yang besarnya berdasarkan pagu indikatif yang telah disesuaikan dengan beban kinerja terhadap program dan kegiatan yang direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								5.218.898.998					5.740.840.598
5	01				PERENCANAAN								4.782.000.898					5.130.840.598
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				Level 3			3.480.787.198			Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.646.840.598
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				20 JPL						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu				100%	2.986.390.406			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	2.986.390.406
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Barru		27 Orang/bu lan		2.986.390.406	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bu lan	2.986.390.406
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu				100%	87.776.000			Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	190.000.000
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Barru		26 Orang		87.776.000	DAU		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	190.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				100%	200.147.600			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	257.169.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan		Barru		1 Paket		4.655.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.850.000
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Barru		2 Paket		9.510.600	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.005.000
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Barru		6 Paket		4.079.000	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10.005.000
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Barru		4 Paket		4.152.500	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	22.384.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Barru		4 Paket		6.437.500	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.732.000
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Barru		12 Laporan		1.920.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.800.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Barru		126 Laporan		169.393.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	169.393.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100%	34.142.000			Persentase pemuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	44.000.000
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Barru		9 Unit		34.142.000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	44.000.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemuhan layanan jasa penunjang urusan				100%	127.806.192			Persentase pemuhan layanan jasa penunjang urusan	100%	127.806.192

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								pemerintahan daerah								pemerintahan daerah		
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Barru		24 Laporan		52.206.192	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Barru		12 Laporan		75.600.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.600.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara				100%	44.525.000			Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	41.475.000
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Barru		6 Unit		15.025.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	15.025.000
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Barru		51 Unit		21.450.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	21.450.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		Barru		1 Unit		8.050.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu				100%			743.142.500			Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	974.000.000
						Persentase rata-				100%						Persentase	100%	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						rata capaian kinerja program RPJMD										rata-rata capaian kinerja program RPJMD		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan				100%	655.458.000			Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	819.000.000
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Barru		1 Berita Acara		11.905.000	DAU		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	20.000.000
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Barru		1 Berita Acara		23.154.000	DAU		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50.000.000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Barru		2 Berita Acara		90.343.000	DAU		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kot a	2 Berita Acara	90.000.000
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)		Barru		11 Dokumen		530.056.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD)	11 Dokumen	659.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan				100%	7.221.500			Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100%	20.000.000
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Barru	44 Orang			7.221.500	DAU		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	20.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian,			Persentase				100%	80.463.000			Persentase	100%	135.000.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan								laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan		
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Barru		8 Laporan		12.761.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	67.500.000
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Barru		16 Laporan		67.702.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	67.500.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan				100%			558.071.200			Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembang n daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	510.000.000
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahanda n Pembangunan Manusia			Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun				48 Rekomen dasi / Kajian / Laporan	220.566.200			Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	64 Rekomen dasi / Kajian / Laporan	170.000.000
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir		Barru		24 Dokumen		44.168.400	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	36 Dokumen	42.500.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Barru		12 Laporan		63.317.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Barru		8 Dokumen		25.217.900	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Barru		4 Laporan		87.862.900	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun				18 Rekomen dasi / Kajian / Laporan	168.363.600			Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	24 Rekomen dasi / Kajian / Laporan	170.000.000
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Barru		8 Dokumen		28.831.800	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD. RPJMD dan	12 Dokumen	42.500.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Tolak Ukur	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
																RKPD)		
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian		Barru		4 Laporan		46.587.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Barru		4 Dokumen		57.820.800	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA		Barru		2 Laporan		35.124.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	42.500.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun					33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	169.141.400			Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Barru		8 Dokumen		75.239.800	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur		Barru		4 Laporan		87.414.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang	4 Laporan	42.500.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Infrastruktur											Infrastruktur		
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Barru		14 Dokumen		2.217.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	42.500.000
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		Barru		7 Laporan		4.270.600	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	42.500.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								436.898.100					610.000.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah				≥ 842 Poin			436.898.100			Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 921 Poin	610.000.000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggara an pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan				100%	318.230.800			Persentase dokumen penelitian dan pengembang an bidang penyelenggara an pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	488.000.000
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Otonomi Daerah		Barru		1 Laporan		77.927.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Otonomi Daerah	1 Laporan	122.000.000
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,		Barru		1 Laporan		73.173.800	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	122.000.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		Barru		1 Rekomen dasi		70.652.500	DAU		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomen dasi	122.000.000
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Barru		1 Laporan		96.477.500	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	122.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan				100%	118.667.300			Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	122.000.000
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Barru		1 Laporan		118.667.300	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	122.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

- a. Perumusan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
- b. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 yang penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yaitu tahun anggaran 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan telah dilakukan pemuktahiran melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Hasil

- pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur selanjutnya dilakukan penginputan pada aplikasi SIPD-RI.
- c. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Tahun 2024.
 - d. Apabila terjadi rasionalisasi anggaran yang diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan daerah yang menyebabkan ketidaksusuaian perencanaan kinerja dengan anggaran maka akan dilakukan penyesuaian terhadap selisih anggaran yang ada dengan cara memfokuskan anggaran pada kegiatan yang memiliki urgensi langsung dengan pencapaian target Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda. Sementara itu, untuk kegiatan yang termasuk penunjang urusan akan dilakukan pengurangan pada target kinerja yang berimplikasi pada pengurangan anggaran. Target kinerja yang telah dikurangi akan direalokasi pada perubahan anggaran tahun 2024 atau pada perencanaan tahun 2025 untuk memenuhi pencapaian target kegiatan periode akhir perencanaan jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.
 - e. Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulan, semesteran dan tahunan atas pelaksanaan Renja Tahun 2024 dalam rangka pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efektif dan efisien.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2024, dimungkinkan terjadi perubahan Renja apabila terjadi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- b. Perubahan-perubahan yang terjadi akan dirumuskan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024.
- c. Renja Bappelitbangda Tahun 2024 menjadi pedoman kerja bagi seluruh ASN lingkup Bappelitbangda Kabupaten Barru sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada core value BerAKHLAK dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja.

Barru, 31 Juli 2023

**KEPALA BADAN,**
Ir. H. NASRUDDIN, M.A.P
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640315 199003 1 015